

Determinan Pengaruh Kecenderungan *Fraud* Dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial Covid-19

Vicky Herviana¹, Arum Ardianingsih², Rika Adriyana^{3*}

^{1,2,3*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan, Kota Pekalongan, Indonesia

Email: ¹vickyherviana25@gmail.com, ²arumbundavina@gmail.com, ^{3*}adriyana.rika@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the determinants of the influence of the tendency of fraud in the distribution of social assistance funds in the city of Pekalongan. The distribution of social assistance funds provided by the Government to communities affected by COVID-10 needs special attention because in practice in the field there are many cases of fraud. This study uses a quantitative approach. The sample in this study were 32 employees at the Social Service of Pekalongan City. The type of data is primary data, namely questionnaires distributed to respondents. The results showed that the suitability of compensation, apparatus competence, and morality were not significant to the tendency of fraud. Internal control and organizational culture have a negative effect on the tendency of fraud, while the enforcement of regulations has a positive effect on the tendency of fraud.

Keywords: *Fraud, Internal Control, Organizational Culture, Enforcement of Regulation, Suitability of Compensation, Apparatus Competence, Morality.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan pengaruh kecenderungan *fraud* dalam penyaluran dana bantuan sosial di kota Pekalongan. Penyaluran dana bantuan sosial yang diberikan Pemerintah terhadap masyarakat terdampak covid-10 perlu perhatian khusus karena praktik di lapangan terjadi banyak kasus penyelewengan / kecurangan (*fraud*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 32 pegawai pada Dinas Sosial Kota Pekalongan. Jenis data adalah data primer yaitu kuesioner yang di bagikan kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur, dan moralitas tidak signifikan terhadap kecenderungan *fraud*. Pengendalian internal dan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* sedangkan penegakkan peraturan berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*.

Kata Kunci: *Fraud, Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Penegakan Peraturan, Kesesuaian Kompensasi, Kompetensi Aparatur, Moralitas.*

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pandemi Covid-19 berlangsung selama kurun waktu dua tahun. Pandemi Covid-19 memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional. Pandemi covid-19 melemahkan semua aktivitas masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Dampak yang sangat terasa adalah melemahnya tingkat konsumsi terutama konsumsi rumah tangga. Daya beli masyarakat mengalami penurunan yang signifikan.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dan strategi kebijakan sebagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Strategi kebijakan pemerintah untuk pemulihan perekonomian salah satunya mengelontarkan skema bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Program ini ditunjukkan untuk membantu meningkatkan daya beli

masyarakat serta memulihkan perekonomian secara menyeluruh. Pemberian dana sosial ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi sehingga roda ekonomi diharapkan akan ikut berputar.

Dikutip dari website resmi Dinas Sosial Kota Pekalongan, Dinas Sosial telah melakukan kegiatan penyaluran berbagai program bantuan selama masa pandemi yaitu 1) Pemberian PKH (Program Keluarga Harapan); 2) Pemberian Kartu Sembako/BPTN untuk mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 200.000 per orang per bulan ; 3) Penerbitan kartu prakerja dengan pemberian insentif sebesar Rp. 600.000 per orang selama empat bulan; 4) Program Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp. 200.000 per bulan per KK dan diberikan selama 3 bulan (sumber : <https://dinsosp2kb.pekalongankota.go.id>).

Penyaluran bantuan dana sosial (bansos) sebagai upaya untuk penanganan dampak Covid-19 tak terlepas dari berbagai masalah. Penyaluran bansos bagi masyarakat miskin terdampak covid-19 , nyatanya menuai banyak polemik karena realisasi di lapangan dinilai rawan tidak tepat sasaran (Purwanto, 2020). Banyak masyarakat miskin yang terdampak tidak dapat menerima bansos dikarenakan penyaluran yang tidak tepat sasaran seperti seperti warga sudah lama meninggal, pindah domisili, ASN tercatat sebagai penerima bantuan. Ketidakvalidan data penerima bansos bermasalah terjadi sejak pertama bansos covid-19 disalurkan. Ketidak mutakhiran data penerima bansos menyebabkan kesemrawutan dalam penyaluran bansos.

Masalah ketidakvalidan penerima bansos menjadi peluang pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan (*fraud*) dalam penyalurannya. Fakta terungkap adanya kasus korupsi dana sosial yang didalangi oleh Menteri Sosial yaitu Juliari P Batubara. Bansos yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin terdampak malah menjadi sasaran korupsi sejumlah pejabat yang ada di Kementerian Sosial. Carut marut pendataan bansos dan kecurangan pengadaan bansos sembako tidak hanya di tingkat pemerintah pusat saja tetapi di tingkat pemerintah daerah juga terjadi permasalahan seperti adanya pemotongan dan pungutan liar di awal penyaluran bansos. Pemotongan bansos termasuk bentuk kecurangan (*fraud*) yang paling banyak ditemukan masyarakat.

Dikutip dari website RMOLJATENG diungkapkan bahwa 7.000 warga Pekalongan mengembalikan bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa adanya data yang tumpang tindih sehingga menimbulkan pemberian bantuan sosial diberikan pada anggota keluarga dalam KK yang sama sebanyak 2 kali serta diberikan pada masyarakat yang sudah mampu (Bakti, 2020). Adanya dugaan pemotongan dana Bantuan Sosial COVID-19 oleh Dinas Sosial Pekalongan yang seharusnya Rp.200.000,- namun hanya diberikan sebesar Rp.177.000,- (Co, 2021). Adanya dugaan tersebut membuat pemerintah mengalihkan penyaluran dana bantuan sosial melalui kantor pos. Namun karena hal tersebut, data penerima harus diverifikasi ulang dan menimbulkan beberapa data penerima yang sudah mampu kembali mendapatkan bantuan sosial. Adapula kasus dimana dana bantuan sosial tunai COVID-19 yang seharusnya diterima dalam jangka waktu 3 bulan, hanya sampai ke tangan penerima bantuan untuk jangka waktu 2 bulan. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa, data penerima bansos yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Pekalongan belum baik dan belum tepat sasaran (Co, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran bansos oleh pemerintah saat ini terdapat sejumlah permasalahan yang menyertainya seperti rawannya terjadi *fraud*.

Fraud Triangel Theory merupakan salah satu teori yang menjelaskan motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan (*fraud*). Wahyuni & Budiwitjaksono (2017) menyatakan bahwa ada dua makna dari tekanan , yang pertama keadaan seseorang merasa tertekan dalam menghadapi kesulitan, dan yang kedua tekanan menjadi motivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai kecurangan (*fraud*). Penelitian-penelitian sejenis telah dilakukan oleh Rachmawaty & Arifuddin(2015) ; Atmadja & Saputra (2017) membahas kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa pada perangkat desa di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya , Antarwiyati & Purnomo, (2017) dalam penelitiannya kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap motivasi melakukan fraud. Selanjutnya Yendrawati dan Paramitha (2014); Antarwiyati & Purnomo(2017) membahas pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap

kecurangan, sedangkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Selain itu, penelitian dilakukan oleh Wilopo (2006); Thoyibatun (2009); Aprishela (2014) yang menemukan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berikutnya penelitian mengenai moralitas yang dilakukan oleh Simanjutak (2005) bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian Didi & Kusuma, (2018) dan Sholehah et al., (2018), moralitas tidak mempengaruhi kecurangan, namun menurut penelitian Wijayanti & Hanafi, (2018) moralitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Didi & Kusuma, (2018) dan Wijayanti & Hanafi, (2018) menunjukkan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan berbeda dengan hasil penelitian Dewi et al (2021).

Keanekaragaman hasil penelitian yang diperoleh dikarenakan adanya ketidakkonsistenan proksi yang digunakan dalam penelitian.. Penggunaan proksi yang berbeda-beda pada setiap penelitian menyebabkan hasil yang bervariasi antara penelitian satu dengan yang lain sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kembali terkait dengan *fraud*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur, pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya organisasi, dan moralitas. Penelitian ini merujuk pada penelitian Antarwiyati & Purnomo, (2017). Dimana penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Antarwiyati & Purnomo, (2017) yang mengembangkan penelitian Yendrawati & Paramita, (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Antarwiyati & Purnomo, (2017) terdapat pada variabel yang digunakan dan obyek penelitian yaitu penambahan variabel kompetensi aparatur yang merupakan bagian dari faktor tekanan dalam melakukan kecurangan, penegakan peraturan yang merupakan bagian dari faktor peluang / kesempatan dalam melakukan kecurangan, budaya organisasi, dan moralitas yang merupakan bagian dari faktor rasionalisasi / pembenaran dalam melakukan kecurangan. Perbedaan objek penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekalongan. Urgensi dari penelitian ini terkait dengan data penerima bansos yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Pekalongan belum baik dan belum tepat sasaran (Co, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran bansos oleh pemerintah saat ini terdapat sejumlah permasalahan yang menyertainya seperti rawannya terjadi *fraud*. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui dan menganalisis determinan yang mempengaruhi individu melakukan tindak kecurangan (*fraud*) terhadap penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 di Dinas Sosial Pekalongan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif untuk mencari hubungan sebab-akibat atau kasualitas. Objek penelitian yaitu pegawai Dinas Sosial Kota Pekalongan. Data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa kuesioner yang diajukan kepada pegawai Dinas Sosial Kota Pekalongan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 32 responden yang mengisi kuesioner. Teknik analisis dilakukan dengan : 1) Uji Kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas , 2) Uji Asumsi klasik (heterokedastisitas, multikolinieritas , linieritas dan normalitas; 3) Uji Kelayakan Model (Uji F) dan ; 4) Uji Hipotesis (uji t).

Tabel 1 Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kecenderungan Fraud (Ardianingsih, 2019)	1. Kecurangan laporan keuangan; 2. Penyalahgunaan aset ; 3. Korupsi	Skala likert 1 - 5
2	Kesesuaian Kompensasi (Wilopo, 2006)	1. Kompensasi keuangan ; 2. Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan tugas; 3. Promosi ; 4. Penyelesaian tugas ; 5. Pencapaian sasaran; 6. Pencapaian pribadi	Skala likert 1 - 5
3	Kompetensi Aparatur (Rosalina, 2020)	1. Pengetahuan ; 2.Pemahaman; 3 Kemampuan;4. Nilai; 5.Sikap ; 6. Minat	Skala likert 1 - 5
4	Pengendalian Internal (Ardianingsih, 2019)	1. Lingkungan pengendalian ; 2. Penetapan risiko manajemen; 3. Sistem akuntansi; 4. Aktivitas pengendalian ; 5. Pemantauan	Skala likert 1 - 5
5	Penegakkan Peraturan (Didi & Kusuma, 2018)	1. Instrumen peraturan yang baik; 2. Aparat penegak peraturan yang tangguh; 3. Peralatan/sarana yang memadai; 4. Anggota organisasi yang sadar akan peraturan; 5. Birokrasi yang mendukung	Skala likert 1 - 5
6	Budaya Organisasi (Didi & Kusuma, 2018)	1. Profesionalisme ; 2. Orientasi masyarakat; 3. Orientasi kinerja ; 4. Orientasi kesejahteraan anggota	Skala likert 1 - 5
7	Moralitas (Rosalina, 2020)	1. Sosial; 2.Hati Nurani; 3.Keadilan; 4. Kebebasan	Skala likert 1 – 5

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa kuesioner yang diajukan kepada pegawai Dinas Sosial Kota Pekalongan. Dari 32 kuesioner yang disebarakan, sebanyak 32 kuesioner yang dikembalikan. Dengan demikian seluruh kuesioner dapat diolah menjadi data. Tabel berikut demografi responden

Tabel 2 Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Umur :		
0-30 tahun	-	-
31-35 tahun	7	21,87
36-40 tahun	8	25,00
41-45 tahun	4	12,50
46-50 tahun	3	9,37
50 tahun ke atas	10	31,25
Jabatan :		
Kepala Dinas	1	3,12
Sekretariat	3	9,37
Bidang Pemberdayaan Sosial	4	12,50
Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	6	18,75
Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	4	12,50
UPTD	8	25,00
Kelompok Jabatan Fungsional	6	18,75

Jenis Kelamin :		
Laki – laki	15	46,87
Perempuan	17	53,12
Lama Bekerja :		
1-2 tahun	7	21,87
3-5 tahun	22	68,75
5 tahun ke atas	3	9,37
Tingkat Pendidikan :		
SMA	2	6,25
D1/D3	5	15,62
S1	23	71,87
S2	1	3,12
S3	1	3,12

sumber : data diolah

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat dari kelompok umur responden sebagian besar berumur 50 tahun ke atas dengan persentase 31,25%. Sebagian responden menjabat sebagai UPTD dengan persentase 25%. Apabila dilihat dari jenis kelamin presentase perempuan lebih banyak dari laki – laki yaitu sebesar 53,12% sedangkan laki – laki hanya sebesar 46,87%. Lamanya responden menjabat dalam pekerjaannya sebagian besar selama 3-5 tahun dengan presentase 68,75%. Dan dari tingkat pendidikan yang ditempuh, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan S1 dengan persentase 23%.

Uji Kualitas Data

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Dengan kriteria pengujian dimana dikatakan valid jika nilai signifikan $\alpha < 0,05$ (Afsari et al., 2016). Hasil pengujian validitas data menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk setiap variabel : 1) Fraud ; 2) Kesesuaian Kompensasi ; 3) Kompetensi Aparatur ; 4) Penegakan Hukum ; 6) Budaya Organisasi ; dan 7) Moralitas menunjukkan nilai sig $< 0,05$ maka dikatakan semua valid.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

No	Keterangan	Nilai Sig	Status	No	Keterangan	Nilai Sig	Status
1.	Fraud1	0,023	Valid	19.	Pengendalian Internal1	0,005	Valid
2.	Fraud2	0,003	Valid	20.	Pengendalian Internal2	0,000	Valid
3.	Fraud3	0,038	Valid	21.	Pengendalian Internal3	0,000	Valid
4.	Fraud4	0,006	Valid	22.	Pengendalian Internal4	0,000	Valid
5.	Fraud5	0,000	Valid	23.	Pengendalian Internal5	0,000	Valid
6.	Fraud6	0,000	Valid	24.	Penegakan Peraturan1	0,000	Valid
7.	Kesesuaian kompensasi1	0,006	Valid	25.	Penegakan Peraturan2	0,000	Valid
8.	Kesesuaian kompensasi2	0,029	Valid	26.	Penegakan Peraturan3	0,000	Valid
9.	Kesesuaian kompensasi3	0,000	Valid	27.	Penegakan Peraturan4	0,026	Valid
10.	Kesesuaian kompensasi4	0,000	Valid	28.	Penegakan Peraturan5	0,000	Valid
11.	Kesesuaian kompensasi5	0,009	Valid	29.	Budaya Organisasi1	0,029	Valid
12.	Kesesuaian kompensasi6	0,012	Valid	30.	Budaya Organisasi2	0,000	Valid
13.	Kompetensi Aparatur1	0,036	Valid	31.	Budaya Organisasi3	0,000	Valid
14.	Kompetensi Aparatur2	0,003	Valid	32.	Budaya Organisasi4	0,000	Valid
15.	Kompetensi Aparatur3	0,007	Valid	33.	Moralitas1	0,000	Valid
16.	Kompetensi Aparatur4	0,025	Valid	34.	Moralitas2	0,002	Valid
17.	Kompetensi Aparatur5	0,004	Valid	35.	Moralitas3	0,013	Valid
18.	Kompetensi Aparatur6	0,014	Valid	36.	Moralitas4	0,000	Valid

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini adalah Cronbach Alpha. Kriteria pengujian adalah jika koefisien alpha (α) $>0,7$ maka instrumen yang digunakan dikatakan *reliable*.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Data

No	Variabel	Nilai Cronbach <i>Alpha</i>	Keterangan
1.	Kecurangan	0,765	reliabel
2.	Kesesuaian Kompensasi	0,720	reliabel
3.	Kompetensi Aparatur	0,777	reliabel
4.	Pengendalian Internal	0,778	reliabel
5.	Penegakan Peraturan	0,796	reliabel
6.	Budaya Organisasi	0,773	reliabel
7.	Moralitas	0,710	reliabel

Sumber: data diolah

Dari tabel 3 terlihat bahwa semua variabel baik itu kecurangan, kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur, pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya organisasi, dan moralitas semuanya reliabel, hal ini terlihat dari nilai cronbach alpha dari variabel kecurangan, kesesuaian kompensasi, kompetensi aparatur, pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya organisasi, dan moralitas memiliki nilai $> 0,7$.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari (1) Uji Normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-smirnov, didapatkan nilai sebesar $0,388 > 0,05$ maka dikatakan residula terdistribusi normal. (2) Uji heterokedastisitas menggunakan uji glejser yaitu melihat nilai signifikansi diatas $> 0,05$. Hasil pengolahan data didapatkan nilai signifikan masing-masing variabel yaitu kesesuaian kompensasi dengan nilai signifikan $0,0432$, kompetensi aparatur nilai signifikan sebesar $0,894$, pengendalian internal dengan nilai signifikan $0,304$, penegakan hukum nilai signifikansi sebesar $0,726$, budaya organisasi nilai signifikan sebesar $0,953$, dan moralitas nilai signifikan sebesar $0,759$. Berdasarkan hasil nilai signifikansi semua variabel $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas. (3) Uji Multikolinieritas menggunakan nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) pada seluruh variabel menunjukkan nilai VIF < 10 . Nilai VIF kesesuaian kompensasi sebesar $1,252$; nilai VIF Kompetensi aparatur sebesar $1,147$; nilai VIF Pengendalian internal sebesar $1,268$; nilai VIF Penegakan hukum sebesar $1,197$; nilai VIF budaya organisasi sebesar $1,644$; dan nilai VIF moralitas sebesar $1,693$. (4) Uji linieritas dengan *lack of fit test* pada variabel kesesuaian kompensasi memiliki nilai sig sebesar $0,924$, kompetensi aparatur sebesar $0,940$, nilai sig pengendalian internal sebesar $0,682$, nilai sig penegakan peraturan sebesar $0,712$, nilai sig budaya organisasi sebesar $0,248$, nilai sig moralitas sebesar $0,33$. Dapat disimpulkan bahwa setiap variabel memiliki hubungan yang linier terhadap kecenderungan fraud. Dengan kata lain uji linieritas terpenuhi.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat bahwa model penelitian fit. Nilai signifikansi dari tabel F menunjukkan signifikansi sebesar $0,035$. Nilai sig $0,035 < 0,05$ maka model penelitian dikatakan fit/layak

Tabel 5 Hasil Pengujian Goodness of Fit

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.066	6	7.011	4.454	.035 ^b
	Residual	165.652	25	.626		

Total	183.719	31		
-------	---------	----	--	--

a. Dependent Variable: TOT_Y

b. Predictors: (Constant), TOT_X6, TOT_X3, TOT_X2, TOT_X4, TOT_X1, TOT_X5

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian dengan Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel dependen atau tidak. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (Afsari et al., 2016).

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi

No.	Variabel	Standardized Coefficients	Sig	Simpulan
1	Kesesuaian Kompensasi	0.208	0.938	Tidak signifikan
2	Kompetensi Aparatur	0.141	0.495	Tidak signifikan
3	Pengendalian Internal	-0.115	0.047	Signifikan
4	Penegakan Peraturan	0.209	0.025	Signifikan
5	Budaya Organisasi	-0.029	0.006	Signifikan
6	Moralitas	-0.285	0.060	Tidak signifikan

Sumber : data diolah

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Fraud

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasil pengujian variabel kesesuaian kompensasi menunjukkan nilai sig sebesar 0,938 > 0,05 yang artinya hipotesis ditolak sehingga tidak ada pengaruh signifikan variabel kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 di Dinas Sosial Pekalongan. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan kinerja pegawai akan membuat pegawai enggan untuk melakukan tindak kecurangan. Namun dalam penelitian ini, pemberian kompensasi tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecenderungan *fraud*. Hal tersebut karena tujuan pegawai di Dinas Sosial Kota Pekalongan sendiri adalah untuk melayani masyarakat dengan profesional sehingga mereka tidak memperdulikan seberapa banyak kompensasi yang mereka dapatkan dan lebih mementingkan melayani masyarakat dengan profesional. Hal ini didukung dengan jawaban responden rata-rata tertinggi indikator pertanyaan 5 sebesar 3,90 bahwa sebagian responden menganggap bahwa taanggung jawab penyusunan laporan keuangan merupakan tugas menantang yang harus diciptakan dalam waktu tertentu dengan baik. Sedangkan rata – rata terendah jawaban responden terdapat pada indikator pertanyaan ke 1 dari variabel kesesuaian kompensasi yaitu sebesar 2,71. Dimana hal tersebut berarti sebagian responden menganggap kompensasi keuangan yang cukup baik akan mempengaruhi pencapaian kerja dimana sebagian besar pegawai menyatakan bahwa kompensasi yang telah mereka terima atas pekerjaan mereka sudah memuaskan, sehingga tidak menjadikan tekanan bagi mereka untuk melakukan kecurangan/ *fraud*. Namun ada beberapa pegawai yang tidak puas dengan kompensasi yang mereka terima atas pekerjaan yang telah dilakukan. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Antarwiyati & Purnomo (2017) dan Wilopo (2006) dimana dalam penelitiannya kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap motivasi melakukan *fraud*.

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kecenderungan Fraud

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasil pengujian variabel kompetensi aparatur nilai sig sebesar $0,495 > 0,05$ yang artinya hipotesis ditolak sehingga tidak ada pengaruh signifikan variabel kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 di Dinas Sosial Pekalongan. Kompetensi aparatur merupakan kemampuan yang dimiliki pegawai di Dinas Sosial Kota Pekalongan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Namun dalam penelitian ini, pegawai di Dinas Sosial Kota Pekalongan memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak menjadikan hal tersebut tekanan untuk melakukan tindak *fraud*. Hal ini didukung dengan jawaban responden rata – rata terbanyak jawaban responden terdapat pada indikator indikator pertanyaan ke 1 dari variabel kompetensi aparatur yaitu sebesar 4,43 bahwa sebagian responden menganggap dapat mengetahui berbagai bentuk prosedur dan peraturan anggaran tanpa harus banyak diarahkan oleh orang lain dengan sangat baik. Sedangkan rata – rata terendah jawaban responden terdapat pada indikator pertanyaan ke 6 dari variabel kompetensi aparatur yaitu sebesar 3,84. Dimana hal tersebut berarti sebagian responden merasa memiliki minat untuk memajukan program Dinas Sosial Kota Pekalongan agar bisa berguna bagi masyarakat dengan baik. Pegawai Dinas Sosial Kota Pekalongan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang baik dalam melakukan pekerjaannya sehingga tidak menjadikan tekanan bagi mereka untuk mencapai target mereka dan melakukan kecurangan/*fraud*. Namun ada beberapa responden yang merasa bahwa mereka belum memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang baik dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Rosalina (2020) dan Faisal (2013) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Fraud

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasil pengujian variabel pengendalian internal memiliki nilai sig sebesar $0,047 < 0,05$ dan t hitung bernilai 0,536 (negatif) yang artinya hipotesis diterima sehingga pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 di Dinas Sosial Pekalongan. Pengendalian internal merupakan proses pemantauan dan pengawasan atas kegiatan operasional di Dinas Sosial Kota Pekalongan. Ketika dalam aktivitas pengendalian internal tidak diimbangi dengan sanksi yang tegas atas pelanggaran maka memungkinkan pegawai melakukan pelanggaran – pelanggaran. Oleh karena itu, lemahnya pengendalian internal dapat menjadi penyebab pegawai melakukan tindakan *fraud*. Hal ini juga didukung dengan jawaban responden dimana rata – rata terbanyak jawaban responden terdapat pada indikator pertanyaan ke 5 dari variabel pengendalian internal yaitu sebesar 4,25 bahwa sebagian responden setuju bahwa pengawasan dan pemantauan pekerjaan serta kinerja pegawai dilakukan secara rutin di instansi tempat mereka bekerja sangat baik. Sedangkan rata – rata terendah jawaban responden terdapat pada indikator pertanyaan ke 2 dari variabel pengendalian internal yaitu sebesar 3,56 bahwa sebagian responden menganggap bahwa deskripsi pekerjaan, pelatihan pegawai, rencana operasional, jadwal, dan anggaran sudah baik. Sebagian besar pegawai menyatakan bahwa tingkat pengendalian internal ditempat mereka bekerja cukup rendah sehingga menjadikan seseorang dapat melakukan tindak kecurangan / *fraud*. Namun ada beberapa pegawai yang merasa tingkat pengendalian internal ditempat mereka bekerja sudah cukup baik. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Atmadja & Saputra (2017), dan Antarwiyati & Purnomo (2017) yang menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan

Pengaruh Penegakan Peraturan terhadap Kecenderungan Fraud

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasil pengujian variabel penegakan peraturan memiliki nilai sig sebesar $0,025 < 0,05$ dan t hitung bernilai 1,005 (positif) yang artinya hipotesis diterima sehingga penegakan peraturan berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 di Dinas Sosial Pekalongan. Untuk menjaga kestabilan di Dinas Sosial Kota Pekalongan, perlu dilakukan penegakan peraturan secara konsisten dan tegas bagi pelanggar peraturan yang bertujuan agar pelanggaran tersebut tidak terulang sekaligus memberikan efek jera. Namun dalam penelitian ini, penegakan peraturan yang terlalu ketat di Dinas Sosial kota Pekalongan

justru dapat memungkinkan terjadinya kecurangan. Hal ini didukung dengan dengan jawaban responden rata – rata terbanyak jawaban responden terdapat pada indikator pertanyaan ke 3 dari variabel penegakan peraturan yaitu sebesar 4,37 bahwa sebagian responden setuju bahwa terdapat peralatan/sarana yang sangat memadai di instansi tempat mereka bekerja. Sedangkan rata – rata terendah jawaban responden terdapat pada indikator pertanyaan ke 2 dari variabel penegakan peraturan yaitu sebesar 3,56. Dimana hal tersebut berarti sebagian responden menganggap bahwa penegakan peraturan di Dinas Sosial Pekalongan tempat mereka bekerja sudah tegas dan baik. Hasil ini didapatkan berdasarkan data yang telah diolah. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Faisal (2013) dan Rosalina (2020) dalam penelitian Dewi et al. (2021) yang menunjukkan hasil bahwa penegakan peraturan berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Fraud

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasil pengujian variabel budaya organisasi memiliki nilai sig sebesar $0,006 < 0,05$ dan t hitung bernilai 0,119 (negatif) yang artinya hipotesis diterima sehingga budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 di Dinas Sosial Pekalongan. Budaya organisasi sangat cenderung membentuk standar etika yang tinggi. Jika suatu budaya itu kuat dan mendukung standar etika yang tinggi, maka akan memiliki pengaruh yang sangat ampuh dan positif terhadap pegawai di Dinas Sosial Kota Pekalongan. Sehingga semakin tinggi atau baik budaya organisasi yang ada di Dinas Sosial Kota Pekalongan maka semakin baik kinerja seseorang dan membuatnya enggan melakukan kecenderungan kecurangan begitupula sebaliknya. Hal ini didukung dengan jawaban responden dimana rata – rata terbanyak jawaban responden terdapat pada indikator pertanyaan ke 1 dari variabel budaya organisasi yaitu sebesar 4,28 bahwa sebagian responden setuju bahwa memiliki keterlibatan yang tinggi di dalam pekerjaan mereka memiliki keterlibatan yang sangat baik di dalam pekerjaan mereka. Sedangkan rata – rata terendah jawaban responden terdapat pada indikator pertanyaan ke 4 dari variabel budaya organisasi yaitu sebesar 3,81. Dimana hal tersebut berarti sebagian responden menganggap bahwa visi perusahaan dapat menciptakan kegairahan dan motivasi bagi pegawai dengan baik. Hasil ini didapatkan berdasarkan data yang telah diolah. Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh Wijayanti & Hanafi (2018) dan Didi & Kusuma (2018) penelitian yang menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan.

Pengaruh Moralitas terhadap Kecenderungan Fraud

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hasil pengujian variabel moralitas nilai sig sebesar $0,060 > 0,05$ yang artinya hipotesis ditolak sehingga moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 di Dinas Sosial Pekalongan. Moralitas merupakan sebuah nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi pegawai di Dinas Sosial Kota Pekalongan dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas individu dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Namun dalam penelitian ini, moralitas tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembenaran atas pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga dalam melakukan tugasnya pegawai di Dinas Sosial Kota Pekalongan menerapkan nilai dan norma yang mereka miliki dengan baik. Hal ini didukung dengan jawaban responden rata – rata terbanyak jawaban responden terdapat pada indikator pertanyaan ke 4 dari variabel moralitas yaitu sebesar 4,43 bahwa sebagian responden setuju bahwa memiliki perhatian lebih besar terhadap kebaikan dan kejujuran setiap orang dalam bekerja dengan sangat baik. Sedangkan rata – rata terendah jawaban responden terdapat pada indikator pertanyaan ke 2 dari variabel moralitas yaitu sebesar 4,28. Dimana hal tersebut berarti sebagian responden menganggap bahwa mereka memiliki hati baik yang tidak serakah dan tidak lupa diri pada hal yang akan merugikan suatu hari nanti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai sudah menerapkan nilai dan norma yang mereka miliki dengan baik dalam melakukan pekerjaannya sehingga moralitas tidak dapat dijadikan rasionalisasi dalam melakukan tindak kecurangan/*fraud*. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Didi & Kusuma (2018) dan Sholehah et al. (2018) yang menunjukkan hasil bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi yang

diberikan dan kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan fraud dalam penyaluran dana bantuan sosial covid-19. Artinya tidak memberikan kontribusi dalam melakukan tindakan kecurangan bagi pegawai di Dinas Sosial Kota Pekalongan. Hal ini dikarenakan pegawai memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang baik serta bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam menyelesaikan tugasnya. Pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud. Pengendalian internal merupakan proses pemantauan dan pengawasan atas kegiatan operasional di Dinas Sosial Kota Pekalongan. Ketika dalam aktivitas pengendalian internal tidak diimbangi dengan sanksi yang tegas atas pelanggaran maka memungkinkan pegawai melakukan pelanggaran – pelanggaran. Oleh karena itu, lemahnya pengendalian internal dapat menjadi penyebab pegawai melakukan tindakan *fraud*. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud. Budaya organisasi sangat cenderung membentuk standar etika yang tinggi. Jika suatu budaya itu kuat dan mendukung standar etika yang tinggi, maka akan memiliki pengaruh yang sangat ampuh dan positif terhadap pegawai di Dinas Sosial Kota Pekalongan. Penegakan peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud. Untuk menjaga kestabilan di Dinas Sosial Kota Pekalongan, perlu dilakukan penegakan peraturan secara konsisten dan tegas bagi pelanggar peraturan yang bertujuan agar pelanggaran tersebut tidak terulang sekaligus memberikan efek jera. Moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan fraud. Moralitas bukan merupakan penyebab utama seseorang melakukan kecenderungan fraud.

REFERENCES

- [1] Afsari Siti. (2016). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Berdasarkan Teori Fraud Triangle: Persepsi Pegawai Pemerintahan. *Digital Digital Repository Universitas Universitas Jember Jember*.
- [2] Antarwiyati, P., & Purnomo, R. E. (2017). Motivasi melakukan fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(7).
- [3] Aprishella, A. (2014). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, III(2).
- [4] Ardianingsih, A. (2019). *Audit Laporan Keuangan* (B. Fatmawati sari (Ed.); Cet 2). Bumi Aksara.
- [5] Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1, 7. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02>
- [6] Bakti, B. (2020). 7.000 Warga Kota Pekalongan Kembalikan Bansos. *Rmoljateng*. <https://www.rmoljawatengah.id/7.000-warga-kota-pekalongan-kembalikan-bansos>
- [7] Co, T. (2021). *Mensos Risma Pantau Penyaluran Bansos di Pekalongan*. <https://nasional.tempo.co/amp/1488384/mensos-risma-pantau-penyialuran-bansos-di-pekalongan#>
- [8] Dewi, H. R., Mahmudi, M., & Maulana, R. (2021). An analysis on fraud tendency of village government officials. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(1), 33–44. <https://doi.org/10.20885/jai.vol25.iss1.art4>
- [9] Didi, D., & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01>
- [10] Dinsosp2kb, P. (2021). *Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Pekalongan*. <https://dinsosp2kb.pekalongankota.go.id>
- [11] Faisal, M. (2013). Analisis Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal*, 2, 67–73.
- [12] *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial*. (2019). 1–18.
- [13] Purwanto, I. (2020). *Analisis ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial covid-19 sesuai peraturan menteri sosial RI no. 20 tahun 2019 (studi ada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)*. 2019(20).
- [14] Rachmawaty, S., & Arifuddin, M. (2015). *Pengaruh Komitmen Aoaratur Fungsional dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara)*.
- [15] Rosalina, D. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi Dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dana Desa Dengan Ketaatan Aturan Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Padamara Kabupaten)*.
- [16] Sholehah, N. L. H., Rahim, S., & Muslim, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Personal Culture Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada OPD Provinsi

- Gorontalo). *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 40–54. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.62>
- [17] Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9–18.
- [18] Wahyuni, W., & Budiwitjaksono, G. S. (2017). Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 47. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.133>
- [19] Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.
- [20] Wilopo. (2006). Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, 19(031), 23–26.
- [21] Yendrawati, R., & Paramita, K. . (2014). Pengaruh keadilan organisasi terhadap motivasi melakukan kecurangan dengan kualitas pengendalian internal sebagai variabel moderating. *Inovasi Dan Kewirausahaan*, 3, 49–59.